



Persepsi Masyarakat terhadap Wacana Pemekaran Kabupaten Aceh Besar

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Mulkan Karima Universitas Syiah Kuala mulkankarima22@gmail.com +6285262762257	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Ardiansyah Universitas Syiah Kuala ardiansyah@usk.ac.i +6285260003065	
Annisah Putri Universitas Syiah Kuala annisahputri@usk.ac.id +6285277567665	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Karima, M., Ardiansyah., & Putri, A. (2025). Persepsi Masyarakat terhadap Wacana Pemekaran Kabupaten Aceh Besar. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 779-785.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana masyarakat memandang wacana pemekaran Kabupaten Aceh Besar. Fokus utama penelitian ini terletak pada persepsi warga di Kecamatan Darul Imarah, Baitussalam, Ingin Jaya, Kuta Baro, dan Peukan Bada, yang memiliki keragaman sosial dan budaya. Wacana pemekaran ini menarik untuk diteliti karena dapat mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Memahami pandangan masyarakat sangat penting agar langkah-langkah strategis dapat direncanakan untuk menghadapi proses pemekaran. Penelitian ini didukung dengan teori persepsi yang menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses kognitif individu dalam menilai dan memahami keadaan di sekitarnya. Di samping itu, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode survei yang termasuk dalam kategori metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui responden di Kecamatan Darul Imarah dan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Dalam menganalisis data, diterapkan metode regresi linear berganda. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki persepsi positif terhadap wacana pemekaran Kabupaten Aceh Besar. Persamaan regresi yang ditemukan adalah $Y = 30,329 + 0,332X$, dimana Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam persepsi masyarakat akan mendorong peningkatan pandangan terhadap pemekaran sebesar 0,332 atau setara dengan 33,2%. Temuan ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan mengenai pemekaran Kabupaten Aceh Besar. Masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap dampak positif pemekaran, sehingga perlu ada kebijakan yang mengakomodasi keinginan mereka.

Kata Kunci: Persepsi, Pemekaran, Kabupaten Aceh Besar

Abstract

This study aims to explore how the community perceives the discourse on the expansion of Aceh Besar District. The primary focus is on the perceptions of residents in the sub-districts of Darul Imarah, Baitussalam, Ingin Jaya, Kuta Baro, and Peukan Bada, known for their social and cultural diversity. The expansion discourse is significant to investigate as it could influence the region's social and economic aspects. Understanding public opinion is crucial for planning strategic steps to address the expansion process effectively. This research is supported by perception theory, which explains that perception is an individual's cognitive process of assessing and interpreting their surroundings. In addition, the approach applied in this research is a survey method that falls into the category of quantitative methods. Data was collected through respondents in Darul Imarah and Baitussalam sub-districts, Aceh Besar district. The results indicate that the majority of community members hold a favorable perspective on the expansion discourse. The regression equation obtained is $Y = 30.329 + 0.332X$, indicating that every one-unit increase in public perception results in a 0.332 or 33.2% rise in support for the expansion. These results can be considered by the local government when formulating policies related to the expansion of Aceh Besar District. The community holds high expectations regarding the positive impact of the expansion, emphasizing the need for policies that accommodate public aspirations.

Key Words: Perception, Expansion, Aceh Besar Regency

A. Pendahuluan

Dengan berlangsungnya era reformasi di Indonesia, masyarakat mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan potensi daerah mereka. Regulasi yang mendukung otonomi daerah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, membuka peluang bagi setiap daerah untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan masing-masing. Salah satu bentuk penerapan otonomi daerah yang kerap diusulkan adalah pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran wilayah. Pemekaran ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dengan tujuan mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Meskipun bertujuan menciptakan pemerataan pembangunan, proses pemekaran wilayah sering kali memicu perbedaan pendapat di tengah masyarakat.

Di Provinsi Aceh, pemekaran wilayah telah terjadi dengan pesat, yang mengubah jumlah kabupaten dari 10 menjadi 23 kabupaten/kota. Pemekaran ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan layanan publik. Kabupaten Aceh Besar tetap menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan terkait pemekaran wilayah. Dengan cakupan wilayah yang luas dan populasi yang signifikan, sejumlah warga di beberapa kecamatan merasakan ketidakmerataan dalam pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu gagasan yang muncul adalah pemekaran Kabupaten Aceh Besar menjadi Kabupaten Aceh Raya, yang diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan serta mempercepat proses pembangunan di daerah-daerah terpencil.

Meskipun demikian, isu pemekaran Kabupaten Aceh Besar tidak hanya mendapatkan dukungan, tetapi juga penolakan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa pemekaran lebih bersifat politis dan tidak menjamin kemajuan nyata bagi daerah tersebut. Sebagai contoh, beberapa tokoh masyarakat, seperti Dias Rahmatullah, mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Aceh Besar, mengungkapkan bahwa yang lebih penting bagi masyarakat Aceh Besar saat ini adalah pemerataan pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia di seluruh wilayah, bukan sekadar pemekaran administratif. Di sisi lain, ada pula pandangan yang mendukung pemekaran, seperti yang disampaikan oleh Hamdani, warga Gampong Lamkawe di Kecamatan Darul Imarah, yang beranggapan bahwa pemekaran dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan perhatian pemerintah terhadap wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Mengacu pada adanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, penting untuk mendalami pandangan mereka terhadap wacana pemekaran Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan menganalisis persepsi masyarakat terkait wacana pemekaran, khususnya di Kecamatan Darul Imarah dan Baitussalam yang dikenal dengan

keberagaman sosialnya yang tinggi. Diharapkan, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat dalam merumuskan kebijakan yang sesuai mengenai pemekaran wilayah di Aceh Besar, sekaligus memberikan wawasan lebih mendalam tentang kemungkinan dampak sosial dan ekonomi yang dapat terjadi.

B. Metodologi

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Darul Imarah dan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, yang dipilih karena memiliki keragaman sosial yang tinggi serta adanya perbedaan pendapat terkait wacana pemekaran wilayah. Lokasi ini dianggap mampu memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait dampak potensial dari pemekaran, selain kemudahan akses yang mendukung pengumpulan data secara optimal. Penelitian berlangsung selama dua bulan, dari Desember hingga Januari 2024.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Data diperoleh melalui kuesioner yang dirancang untuk mengevaluasi pandangan masyarakat terhadap pemekaran wilayah. Populasi penelitian mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Besar dengan total 414.490 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2023. Sampling dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria responden yang telah tinggal di wilayah tersebut selama minimal 10 tahun, berpendidikan tinggi, dan memahami wacana pemekaran yang sedang berkembang. Sampel diambil dari beberapa kecamatan, termasuk Darul Imarah dan Baitussalam. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu kuesioner menggunakan skala Likert, observasi langsung, serta dokumentasi. Untuk menganalisis data, dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji t-test, dan analisis regresi linear untuk mengevaluasi hubungan antara wacana pemekaran dan persepsi masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan karakteristik responden, penelitian ini melibatkan 297 partisipan yang dipilih dengan metode purposive sampling. Proporsi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 45% adalah laki-laki dan 55% adalah perempuan. Mayoritas responden berada pada rentang usia 20-30 tahun, yaitu sebanyak 63%, dengan latar belakang pendidikan mayoritas SMA (40%). Responden mencakup berbagai jenis pekerjaan, termasuk PNS (20%), pegawai swasta (22%), petani (19%), freelance (7%), dan wiraswasta/pekerjaan lainnya (32%). Distribusi ini mencerminkan keragaman masyarakat di wilayah penelitian.

Tabel 1 Karakteristik Responden

No	Variabel	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin			
1	Laki laki	134	45%
	Perempuan	163	55%
Jumlah		297	100%
Usia			
2	20-25 Tahun	87	30%
	26-30 Tahun	100	33%
	31-35 Tahun	63	21%
	>36 Tahun	47	16%
Jumlah		297	100%
3	Pekerjaan		
	PNS	60	20%
	Pegawai Swasta	65	22%
	Petani	55	19%
	Freelance	20	7%
	Wiraswasta dan lainnya	97	32%
Jumlah		297	100%

4 Pendidikan		
SMA	120	40%
DIII	60	20%
S1	70	24%
S2	47	16%
Jumlah	297	100%

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki persepsi positif terhadap wacana pemekaran. Skor rata-rata untuk berbagai pernyataan dalam kuesioner menunjukkan bahwa banyak responden setuju dengan manfaat pemekaran dalam meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kemudahan akses administrasi. Pernyataan yang paling didukung adalah terkait dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih dekat dan merata, terutama bagi kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki persepsi positif terhadap wacana pemekaran. Skor rata-rata untuk berbagai pernyataan dalam kuesioner menunjukkan bahwa banyak responden setuju dengan manfaat pemekaran dalam meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kemudahan akses administrasi. Pernyataan yang paling didukung adalah terkait dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih dekat dan merata, terutama bagi kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten.

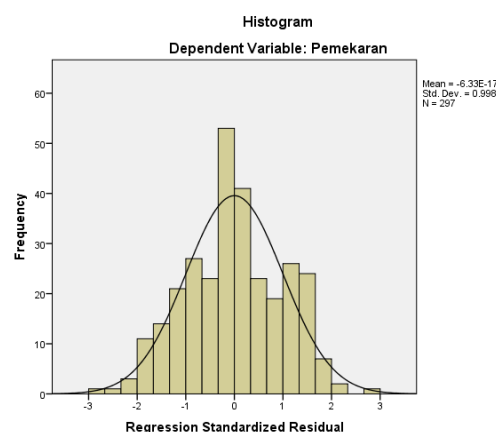
Pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan metode *Product Moment* dan *Cronbach Alpha*. Analisis menunjukkan bahwa semua item dalam kuesioner dinyatakan valid, dengan nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel pada tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, koefisien reliabilitas yang diperoleh adalah 0,85, yang menandakan bahwa instrumen yang digunakan memiliki konsistensi yang tinggi dalam mengukur variabel yang diteliti.

Tabel 2 Analisis Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.141	1.241		13.812	.000
	Persepsi Masyarakat	.494	.032	.666	15.342	.000

a. Dependent Variable: Pemekaran

Hasil analisis regresi linear sederhana menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 30,329 + 0,332X$, di mana Y mewakili variabel pemekaran dan X merupakan variabel persepsi masyarakat. Koefisien regresi sebesar 0,332 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu unit akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,332 pada variabel yang diamati dalam persepsi masyarakat akan berkontribusi pada peningkatan skor pemekaran sebesar 33,2%. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang mencapai 0,45 mengindikasikan bahwa sebesar 45% variasi dalam variabel pemekaran dapat dijelaskan oleh variabel persepsi masyarakat, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.



Gambar 1 Histogram Uji Normalitas

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, yang bertujuan untuk memverifikasi kelayakan model regresi yang digunakan menunjukkan bahwa data telah memenuhi kriteria untuk analisis regresi. Berdasarkan grafik histogram dan P-Plot, data terlihat terdistribusi normal, sementara uji multikolinearitas tidak menemukan adanya korelasi linier yang tinggi antar variabel independen. Hasil tersebut memperkuat validitas model regresi yang diterapkan dalam penelitian ini

Pembahasan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap wacana pemekaran dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam mengakses layanan publik dan kebutuhan akan pemerataan pembangunan. Kecamatan yang jauh dari pusat administrasi di Jantho, seperti Kecamatan Darul Imarah dan Peukan Bada, menunjukkan tingkat dukungan yang lebih tinggi terhadap pemekaran. Hal ini sejalan dengan teori desentralisasi yang menyatakan bahwa pembagian wilayah dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan layanan publik. Penelitian oleh Muhammad Nizar et al. (2018) menunjukkan bahwa pemekaran dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan aksesibilitas pelayanan. Sementara itu, Meta Agustiana (2019) menemukan bahwa pemekaran desa mampu mempercepat pembangunan lokal dan efisiensi pelayanan publik. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan fokus pada persepsi masyarakat sebagai dasar analisis. Namun, terdapat pula suara kontra terhadap pemekaran. Beberapa responden mengkhawatirkan potensi politisasi isu pemekaran dan ketidakadilan alokasi sumber daya di wilayah baru. Perspektif ini menyoroti perlunya kajian lebih mendalam terhadap dampak jangka panjang pemekaran, baik dari aspek ekonomi maupun sosial.

Selain itu, faktor geografis merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Kecamatan yang memiliki jarak lebih dekat dengan ibu kota kabupaten cenderung kurang mendukung wacana pemekaran karena akses pelayanan sudah relatif memadai. Sebaliknya, kecamatan yang lebih terpencil menghadapi kendala geografis yang signifikan, sehingga mendukung pemekaran untuk mempermudah aksesibilitas. Di sisi lain, persepsi positif terhadap pemekaran juga dipengaruhi oleh harapan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat di wilayah yang mendukung pemekaran percaya bahwa pembentukan kabupaten baru akan menciptakan lebih banyak peluang ekonomi lokal, terutama melalui pengembangan infrastruktur dan investasi daerah. Hal ini menjadi salah satu motivasi utama yang mendorong dukungan masyarakat.

Namun demikian, keberhasilan pemekaran juga memerlukan kesiapan infrastruktur dan kapasitas administratif di daerah yang baru. Tanpa perencanaan yang matang, pemekaran berpotensi menciptakan beban baru bagi pemerintah daerah, termasuk alokasi anggaran yang tidak efisien dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan kesiapan sumber daya sebelum melanjutkan proses pemekaran. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya pendekatan partisipatif dalam proses pemekaran. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, memastikan pemerataan sumber daya, dan membangun infrastruktur yang mendukung kebutuhan daerah baru. Langkah strategis ini akan memperkuat legitimasi pemekaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Keterbatasan penelitian ini meliputi ruang lingkup yang terbatas pada dua kecamatan utama, yaitu Darul Imarah dan Baitussalam. Penelitian lanjutan disarankan untuk mencakup wilayah yang lebih luas dan mempertimbangkan variabel lain, seperti kondisi ekonomi dan budaya, yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi positif masyarakat terhadap wacana pemekaran Kabupaten Aceh Besar dapat menjadi dasar yang kuat bagi pengambilan kebijakan. Namun, keberhasilan implementasi pemekaran membutuhkan perencanaan yang matang dan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan manfaat optimal bagi masyarakat.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis alternatif (H1) diterima, yaitu sebagian besar masyarakat di Kabupaten Aceh Besar memiliki persepsi positif terhadap rencana pemekaran wilayah. Mereka memiliki optimisme yang cukup tinggi terhadap dampak positif yang dapat dihasilkan dari pemekaran tersebut. Oleh karena itu, hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap wacana pemekaran Kabupaten Aceh Besar, ditolak. Dampak sosial yang dirasakan masyarakat Desa Sama Guna akibat pemekaran adalah peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan di desa tersebut.

Sebelum pemekaran, pembangunan pendidikan masih terbatas, namun setelah pemekaran terjadi perkembangan yang signifikan. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat Desa Sama Guna adalah peningkatan pendapatan, meskipun belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat. Namun, terdapat tantangan berupa fluktuasi pendapatan yang tergantung pada musim dan hasil panen.

Sebagian besar responden merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pemekaran, menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan perencanaan pasca-pemekaran. Pemerintah perlu memperkuat komunikasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan masyarakat terkait rencana pemekaran Kabupaten Aceh Besar. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan dukungan serta kepercayaan masyarakat terhadap manfaat dan perubahan positif yang dapat dihasilkan dari pemekaran tersebut. Masyarakat diharapkan dapat terus berpartisipasi aktif dalam proses pemekaran, baik melalui masukan, kritik, maupun pengawasan. Keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan akan memastikan bahwa pemekaran dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap rencana pemekaran, seperti aspek sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian yang lebih komprehensif akan memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

E. Referensi

- Abdurrahmat, F. (2006). Manajemen sumber daya manusia. *Bandung: Rineka Cipta*, 97.
- Aceh Besarkab.co.id, 2023, Profil geografis kabupaten Aceh Besar, <https://Aceh Besarkab.go.id/>.
- Agustiana, Meta, (2019). Dampak pemekaran Desa Kedaton dalam peningkatan pelayanan pembangunan masyarakat Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu. Skripsi jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Hal-239, Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik, 2020. Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka 2020, <https://acehbesarkab.bps.go.id/id/publication/2020/04/27/f62cdf3c52a326a908d90927/kabupaten-aceh-besar-dalam-angka-2020.html>
- BAPPENAS. (2008). *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI dan United Nations Development Programme (UNDP).
- Bimo, Walgito, (2007). *Psikologi Kelompok*. Hal-22 Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadari, Nawawi. (2007). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, S. A. W. (2015). DAMPAK PEMEKARAN DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Studi Kasus Pada Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues). *PERSPEKTIF*, 4(1).
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/161/113>
- Khairullah, K., & Cahyadin, M. (2006). Evaluasi pemekaran wilayah di Indonesia: studi kasus Kabupaten Lahat. *Economic Journal of Emerging Markets*.
- Nizar, Muhammad, Nur Syechalad, Mohd dan Gunawan, Eddy, (2018). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota terhadap pembangunan manusia di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*. Vol. 5, No. 2.
- Nuryanti, Siti dan Dwi Pursitasari, Indarini. (2014). Uji Kualitatif Senyawa Metabolit Sekunder Pada Daun Palado (*Agave Angustifolia*) Yang Diekstraksi Dengan Pelarut Air Dan Etanol. Vol 3 (3):165-72 *Jurnal Akademika Kimia*.
- Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 69 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 43 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian dalam negeri.
- Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.
- Rida, S. (2022). *Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kebijakan Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Mensejahterakan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada*

- Masyarakat Pedagang di Paguyuban Kreatif & Wisata Kuliner Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan*) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Robbins, S. P. (2002). Prinsip-prinsip perilaku organisasi. *Jakarta: Erlangga*, 71.
- Serambi News.com, 2015, 7 Kecamatan Dukung Lahirnya Aceh Raya, <https://aceh.tribunnews.com/2015/10/15/7-kecamatan-dukung-lahirnya-aceh-raya>.
- Slameto, (2010). Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal-102, Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang. P. (2005). Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (1989). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
- Sofia, Anggun Pratiwi dan Sutanto, Himawan. (2023) Dampak Pemekaran Desa Pada Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Di Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung. Vol. 9, No. 1
- Sugioyono, (2006), Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D Pitabeta, Bandung. W.J.S Poerwadarminta, (2005), Kamus besar Bahasa Indonesia.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugihartono, dkk, 2007. Psikologi Pendidikan. Hal-8, Yogyakarta: UNY Pers.
- Sunarto, (2004). Perilaku Organisasi. Hal-98, Yogyakarta : Grafika Indah.
- Suratman, S., & Zulhakim, A. A. (2017). *Perencanaan Pengawasan Pembangunan*. Penerbit Adab
- Syarbaini, Syahril, (2014), Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Tarigan, Antonius. (2010). Dampak Pemekaran Wilayah. Artikel dalam Majalah Perencanaan Pembangunan. Bappenas. Jakarta.
- Thoha, Miftah. (2003). Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi. Hal-154, Jakarta: Rajawali.
- Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Yosephus, Silvana, (2014). Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Unsrat, Vol. 3 No. 1 (2014): Januari*.